

BAB II

DESKRIPSI UMUM RUSIA

Memahami Rusia masa kini, tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lalunya. Rusia memiliki sejarah dengan pasang surut pengalaman keberhasilan maupun kegagalan. Setelah melalui pergolakan dan revolusi pada abad XIX dan XX yang menggugat eksistensi sistem kekaisaran dan melakukan eksperimen ideologi komunisme yang dimuali dari kelompok intelektual, Rusia berhasil tampil sebagai negara adidaya yang berideologi Komunisme dengan nama Uni Soviet yang menjadi tulang punggung blok politik dunia, yakni Blok Timur. Namun bersamaan dengan bangkrutnya ideologi totaliter Komunisme yang menjadi dasar politiknya, Uni Soviet bubar, dan muncul nama negara semula, yaitu Rusia yang hingga kini masih bergulat pada proses penyesuaian diri menjadi negara dengan pendekatan ide-ide demokrasi dan pasar bebas.

Nenek moyang bangsa Rusia bisa dirunut dari keberadaan masyarakat Slavia yang terbentuk kurang lebih 2000 tahun yang lampau di kawasan sebelah selatan Baltik. Masyarakat tersebut hidup di sekitar Sungai Visla. Bangsa Polandia sebagai bangsa terkuat di antara bangsa-bangsa Slavia lalu menempati wilayah-wilayah yang sebelumnya dihuni bangsa non-Slavia dengan nama *Russy*. Bangsa tersebut lalu di-Slavia-kan oleh bangsa Polandia tanpa mengubah nama asli mereka. Dari nama inilah kemudian dikenal nama *Rus*, *Russky*, dan kemudian *Rossia* (Rusia) yang terus mengalami perkembangan dan pergeseran budaya.²⁰

²⁰ A. Fahrudji, *Rusia Baru Menuju Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor, 2005 hal 1-8

A. Sejarah Perkembangan Rusia

1. Rusia Sebelum Uni Soviet

Sebelum bergabung dengan USSR (*Union of Soviet Socialist Republics*), Rusia merupakan sebuah pemerintahan yang berbentuk kekaisaran (*Tsar*) atau dikenal dengan periode pra-Bolshevik. Selama berabad-abad bangsa Rusia hidup dalam sebuah sistem pemerintahan feodalistik di mana kelas bangsawan merupakan golongan yang berkuasa. Kekuasaan kaum bangsawan ini secara evolutif merupakan hasil transformasi budaya dan pemikiran pra-agama (paganistik) Struktur masyarakatnya terbentuk secara alami ketika masyarakat memberikan penghormatan (pengkultusan) yang semula diberikan kepada dewa-dewa, kepada tokoh masyarakat yang melindungi mereka dari gangguan luar.

Rusia pra-Bolshevik adalah masyarakat feodal yang dipimpin oleh tuan-tuan tanah dan pemimpin setempat yang menguasai wilayah-wilayah tertentu, di mana sistem kekuasaannya dijalankan secara turun temurun ataupun dengan penaklukan. Terdapat dua dinasti yang selama periode ini memimpin bangsa Rusia, yakni: Dinasti Ryurik dan Dinasti Romanov. Dinasti Ryurik memimpin sekitar tujuh abad sedangkan Dinasti Romanov memimpin sekitar tiga ratus tahun hingga runtuhnya Imperium Rusia di awal abad XX. Imperium Russia, lalu disebut sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah dunia.

Dinasti Ryurik terbentuk pada pertengahan abad ke IX, di mana dinasti ini berperan sebagai peletak dasar kekuasaan Rusia dengan model imperial. Dinasti ini berasal dari bangsa Slavia yang berdiam di daerah Novgorod meminta

perlindungan kepada Pangeran Ryurik karena merasa terancam oleh suku bangsa lain. Kedatangan Ryurik pada tahun 862 M bukan hanya sebagai pelindung, lalu justru menguasai daerah Novgorod dan Kiev.

Karena letak yang strategis antara Eropa dan Asia, maka Kiev mengadakan perdagangan langsung dengan Bizantium. Ryurik meninggal pada tahun 879 M tanpa menentukan siapa pemiliknya sehingga kepemimpinan diambil alih oleh Pangeran Oleg hingga tahun 911 M. Sejak saat itu, setelah Oleg menggabungkan dua kepangeranan, Novgorod dan Kiev, bangsa Rus menyadari persatuan yang semakin terikat di antara mereka yang membentuk budaya Rus kuno. Dalam perjalannya, Kristenisasi Rusia merupakan tahapan penting yang membawa babak baru dalam perkembangan kebudayaan Rusia. Kristen Ortodoks resmi diadopsi Kerajaan pada akhir abad X pada masa Vladimir Svyatoslavich. Kristenisasi inilah yang membuat Rusia dekat dengan Bizantium yang memiliki nilai strategis bagi perdagangan dan keamanan Rusia.

Faktor penting yang menjadi pilar foedalisme Rusia adalah pengaruh Timur. Setelah mengadopsi peradaban Bizantium, corak ketimuran Kristen Ortodoks benar-benar mempengaruhi karakter Bangsa Rus sehingga semakin jauh dari peradaban Barat yang dibawa Katolik Roma. Karakter ini semakin menguat saat ekspedisi penyerbuan Mongol ke Eropa merambah Rusia. Karakter keras yang diwarisi ekspedisi ini menjadi penopang utama bagi pembentukan sebuah negara persatuan yang luas dengan kontrolisasi kelengkapan yang besar dan bental

Pasca serangan Bangsa Mongol bangsa yang dikenal juga dengan Bangsa RusKiev ini mengalami kemunduran hingga akhir abad XV akibat kondisi geografis, di mana bangsa ini terletak di daerah yang sangat luas, membuat perpecahan feodal, bentuk hubungan yang ada dalam masyarakat lebih didasarkan pada masalah ekonomi. Setelah pecahnya RusKiev, muncul kekuatan dari kepangeranan baru yang perlahan menggantikan peran Kiev, yaitu Moskow. Puncak kejayaan Moskow diraih pada masa pemerintahan Ivan I Kalita (1325-1340) yang kembali mempersatukan bangsa Rus. Figur lain yang berhasil memperkuat Moskow selanjutnya adalah Ivan IV. Di bawah kepemimpinannya yang otoriter, Rus menaklukkan Kazan, Astrakhan serta menguasai Siberia yang menjadi bagian dari teritori RusMoskow. Namun tak lama, saat meninggalnya Ivan IV, terjadi zaman kegelapan (1598-1613) di saat kekuatan asing masuk ke wilayah Rus sehingga kepemimpinan-kepemimpinan selanjutnya tergolong sangat singkat. Setelah zaman kegelapan tersebut, munculah kekuatan baru Dinasti Romanov.²¹

Dinasti Romanov memimpin Rusia selama sekitar 3 abad sampai kekuasaan tsarisme jatuh pada Februari 1917. Di bawah komando Mikhail Romanov, Rusia mengalami peningkatan ekonomi. Kebijakan perluasan wilayah mengalami perkembangan pesat, dibarengi industrialisasi. Dinasti Romanov lalu melahirkan banyak pemimpin besar Rusia seperti Peter Agung, Katerina II dan Aleksandr I yang membawa Rusia modern menjadi sebuah imperium yang disegani tak hanya di Eropa namun juga di seluruh dunia.

²¹ *Ibid*, hal 17-54

Dinasti Romanov tak bisa dilepaskan dari sosok seorang Tsar Peter Agung (Peter I). Peter I berjasa mengadakan berbagai perubahan mendasar dalam masyarakat Rusia yang saat itu jauh tertinggal dibanding negara-negara Eropa lain, Peter memimpin dengan melakukan westernisasi, mengadopsi gaya hidup Eropa Barat. Peter I juga melakukan reformasi di saat budaya Gereja terlalu mendominasi kehidupan kenegaraan secara umum. Peter I menjalankan upaya penguatan kekuasaan negara dan pembentukan absolutisme Rusia dengan cara represif. Hasilnya yang konkrit, Rusia memperoleh kemenangan dalam perang Utara melawan Swedia. Di bidang ekonomi, Rusia berhasil membangun lebih dari 100 manufaktur yang sebagian besar dikelola swasta.

Rusia saat ini juga diwarisi ambisi menguasai dunia yang sejak lama muncul. Ambisi terbesar terlihat sejak Tsar Aleksandr I berkuasa. Perhatian masa pemerintahan I terkuras pada masalah penting dalam upaya Rusia memperkuat hegemoninya di Eropa. Di masa ini, Rusia setidaknya terlibat dalam sejumlah perang di antaranya melawan Prancis, Swedia, Turki, dan Persia. Sebagian besar berakhir dengan perjanjian damai yang menguntungkan Rusia sehingga menguatkan hegemoni mereka. Persaingan hegemoni di Eropa ini memuncak saat terjadi perang Patriotik pada tahun 1812, yaitu perang ketiga antara Rusia dan Prancis. Perang ini dipicu kemarahan Prancis akibat penolakan Rusia atas blockade continental yang diberlakukan Napoleon, pemimpin Prancis waktu itu. Dengan bantuan pasukan Prusia, Austria, Swedia, dan Inggris, mereka mengalahkan Prancis. Setelah itu, Rusia memasuki Paris, lalu dengan Kongres

Vienna, kekuasaan Prancis di Eropa berakhir.

Rusia juga tak bisa dilepaskan dari praktek perbudakan. Pada abad-abad XVII-XVIII saat dipimpin Peter Agung dan Katerina Agung, perbudakan mencapai puncaknya. Bangsawan memperoleh kekuasaan legal untuk mengeksploitasi budak. Di masa Katerina II, hak-hak bangsawan bahkan diperluas hingga menyentuh kehidupan pribadi para pekerja. Para pekerja secara bebas dikirim ke Siberia, ke kamp kerja paksa, dan penjara jika dinilai bersalah oleh para bangsawan. Sistem perbudakan mulai dihapuskan sejak abad XIX. Di masa Tsar Aleksandr I (1801-1825), perbudakan awalnya dihapus di sebagian wilayah Rusia. Ia lalu memerintahkan perancangan undang-undang anti perbudakan, namun undang-undang itu baru diresmikan di masa Aleksandr II. Namun pada prakteknya, sistem perbudakan baru benar-benar hilang pada tahun 1917, dan menjadi negara Eropa terakhir yang menghapus institusi perbudakan.

Dinasti Romanov berakhir saat pemerintahan dipimpin Tsar Nikolai II. Tumpukan masalah domestik dan internasional dari periode sebelumnya memunculkan ketidakpercayaan terhadap penguasa. Nikolai lalu mundur sebagai akibat dari Revolusi Februari 1917 dan meninggal dalam pembantaian massal Bolshevik, menandai berakhirnya Dinasti Romanov.²²

2. Rusia di Era Uni Soviet

Periode Uni Soviet merupakan periode singkat yang hanya berlangsung selama 7 dekade, namun memiliki posisi yang cukup penting dalam pembumian Ide Rusia. Di masa ini, latar belakang ideologi religi telah dihapus, dan digantikan

²² *Ibid*, hal 60-94

oleh komunisme. Periode ini berawal saat pada bulan Februari 1917 Tsar Nikolai II dipaksa turun tahta akibat kekalahan Rusia di Perang Dunia I dan Rusia dipimpin oleh kaum borjuis pimpinan Alexander Kerensky. Namun bulan Oktober, Kaum Bolshevik yang salah satunya digerakkan Lenin, melakukan pemberontakan yang memindahkan kekuasaan ke Komite Militer Revolusioner. Dalam Kudeta tepatnya 25 Oktober 1917 itu, diumumkan tuntutan rakyat yang menginginkan pembentukan perdamaian, penghapusan kepemilikan tanah oleh tuan tanah, dan pembentukan pemerintahan Soviet.

Sidang Soviet Rusia II, 25-27 Oktober 1917 lalu membentuk Pemerintahan Soviet Komisaris Rakyat (SNK) pimpinan Lenin. Di bawah kendali Partai Bolshevik yang memperjuangkan kaum pekerja. Mereka memperluas revolusi ke seluruh negeri. Januari 1918 mereka meresmikan berdirinya Republik Soviet Rusia yang lalu diubah namanya menjadi RSFSR (Republik Soviet Sosialis Federasi Rusia). Namun pergolakan terjadi menyusul Revolusi Oktober 1917 itu, Upaya Bolshevik dan Lenin untuk merangkul wilayah bekas Dinasti Romanov lain justru berujung perlawanan menentang upaya Bolshevik. Perbedaan cara pandang mengakibatkan Perang Saudara (1918-1920) setelah polarisasi dua kekuatan yaitu kubu Merah (Bolshevik) dan kubu Putih (kelompok sosialis lainnya). Kedua kubu melancarkan terror yang diperburuk intervensi pihak asing, seperti: AS, Inggris, Prancis, dan Jepang. Kubu Merah yang menguasai Rusia di akhir perang lalu menjadi pelopor terbentuknya 6 republik (Soviet) yang berdaulat secara formal di wilayah bekas Imperium Rusia yaitu: Rusia (RSFSR), Ukraina, Belarusia, Azerbaijan, Armenia, dan Georgia

Deklarasi resmi pembentukan Uni Soviet yang terdiri dari 6 republik itu baru dipaksakan terjadi pada Sidang I Seluruh-Soviet pada 30 Desember 1922 sekaligus disahkan sebuah Perjanjian yang menjadi dasar eksistensi negara ini. Uni Soviet dengan semboyan “Proletar Seluruh Negara Bergabunglah!” lalu mengalami perkembangan pesat sehingga wilayah-wilayah di sekitarnya ikut bergabung, yang terakhir bergabung adalah Moldova, Lithuania, Latvia, dan Estonia pada Agustus 1940.

Setelah meninggalnya Lenin pada tahun 1924, Stalin yang memimpin Uni Soviet dengan birokrasi yang diciptakannya, menempatkan seluruh negara di bawah kekuasaannya. Segala elemen negara dipimpin oleh orang-orang dari partai komunis. Pandangan Rusia-sentris Stalin tampak dalam perayaan kemenangan Rusia pada Perang Dunia II tahun 1945 dengan mengatakan bahwa Rusia adalah bangsa yang memimpin Uni Soviet. Ia berpikiran bahwa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan antagonisme bangsa-bangsa kecuali dominasi satu bangsa atas bangsa-bangsa lainnya. Stalin benar-benar menjadi diktator salah satunya saat berupaya mengindustrialisasi negara dengan mengeksport gandum dan mengambil paksa lahan pertanian sehingga mengakibatkan kelaparan. Diperkirakan sebanyak 25 juta orang menjadi korban penghentian pemberontakan petani karena hal ini.

Totaliterianisme yang ditunjukkan Stalin ini, sangat kontras dengan janji-janji Lenin pada saat meminta dukungan pembentukan Uni Soviet. Lenin justru berdalih akan mengedepankan nasib kaum-kaum minoritas, misalnya kelompok buruh Muslim Rusia dan Timur. Rezim totaliter pimpinan Stalin justru tidak memunculkan adanya kebebasan ide dan kebebasan berpikir. Rezim inilah yang

diyakini menyimpan bom waktu bagi rusaknya bangunan sosialisme itu sendiri yang berakhir pada akhir abad XX.

Adalah Nikita Khrushchev, yang menggantikan posisi saat Stalin meninggal pada tahun 1953. Periode ini menjadi periode sejuk setelah sekian lama masyarakat hidup dalam sistem keras gaya Stalin. Di masa inilah mungkin ada upaya pertama pengenalan demokrasi dalam masyarakat Rusia di saat negara lain di Eropa telah lama menggunakannya. Khrushchev melakukan perombakan besar-besaran di pemerintahan dan organ-organ keamanan negara, juga memberantas sistem komando administrasi-birokrasi yang menjadi tumpuan pada masa Stalin. Salah satu bentuk nyata reformasi Khrushchev adalah penghapusan sistem Gulag yang menjadi bentuk represi fisik-psikis bangsa Rusia selama ini. Di Era Khrushchev ini juga, Soviet mulai melihat pentingnya upaya diplomasi dalam upaya mengurangi ketegangan dunia dengan cara memperluas hubungan kerjasama Uni Soviet dengan negara-negara di dunia. Selain normalisasi hubungan diplomatik dengan Austria, Jerman dan Jepang, Uni Soviet menjalin hubungan dengan negara-negara berkembang di Asia.

Uni Soviet juga dikenal sebagai negara adidaya yang punya pengaruh besar dalam Perang Dunia II. Bangsa ini disebut sebagai salah satu bangsa yang menyelamatkan peradaban Eropa dan dunia, terutama atas cengkraman Nazisme Jerman. Uni Soviet mulai terlibat di Perang Dunia II saat Jerman mengingkari perjanjian tidak saling menyerang dengan Uni Soviet dengan melancarkan serangan. Selama perang, tercatat 26 juta hingga 30 juta rakyat Soviet menjadi korban. Uni Soviet juga sebenarnya berperan penting dalam mengakhiri Perang

Dunia II saat menaklukkan militerisme Jepang, meskipun peran itu seringkali tertutupi pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh AS.

Keterlibatan besar lain Uni Soviet di kancah internasional adalah saat memimpin Pakta Warsawa dalam perang dingin melawan NATO yang dikomandoi AS dan negara-negara Eropa Barat. Kedua kubu selalu berada dalam pihak yang bersebrangan dalam sejumlah peristiwa dunia, di antaranya: Krisis Suez, Krisis Karibia, dan banyak perang saudara yang terjadi di Vietnam, Kora, Afghanistan dan lainnya.²³

Awal kehancuran Soviet dimulai saat pada masa kepemimpinan Leonid Brezhnev di pada tahun 1964. Sikap hati-hati dan konservatif Brezhnev yang akhirnya membawanya ke puncak pemerintahan berimbas kepada kebijakan-kebijakan Uni Soviet yang stagnan sehingga menjatuhkan wibawa Uni Soviet tidak hanya di dalam negeri tapi juga di kancah internasional. Kebijakan luar negeri Brezhnev juga mencerminkan konservatisme dan penguatan kembali hegemoni Soviet untuk mengantisipasi runtuhnya kubu sosialis. Selanjutnya mulai tahun 1980-an, Uni Soviet mengalami krisis politik dan ekonomi akibat bobrohnya birokrasi dan apatisme masyarakat yang semakin besar. Puncaknya terjadi di masa pemerintahan Mikhail Gorbachev akibat kegagalan kebijakan *Glasnost* (keterbukaan) dan *Perestroika* yang ia bangun.

Pada dasarnya Perestroika adalah proses reformasi yang ditujukan untuk memperbaiki struktur pemerintahan dan masyarakat yang berujung penguatan sosialisme. Di bidang ekonomi misalnya, kepemilikan pribadi dan privatisasi yang

sebelumnya dilarang kini diperbolehkan. Namun yang terjadi, saat harga ditentukan pasar, tingkat hidup masyarakat menjadi turun karena kenaikan harga. Sementara dalam konsep *glasnost*, Gorbachev mengisyaratkan bahwa selama tujuh dasawarsa telah terjadi pembungkaman yang sistematis sehingga tidak terakomodasinya partisipasi publik dalam proses politik dan sosial. Gorbachev merubah banyak sistem sehingga membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk berpendapat. Negara yang selama ini dikenal dengan ideologi Komunis, seketika berubah menjadi kekuatan besar yang moderat. Namun, beragamnya suku bangsa dan nasionalisme yang dibalut dalam negara ini, menjadi bumerang. Keterbukaan membuat muncul banyak gerakan separatis. Berbagai konflik antaretnis yang selama ini tersembunyi, mulai muncul dan pada akhirnya membubarkan Uni Soviet pada tahun 1991.²⁴

3. Rusia Pasca Uni Soviet

Revolusi yang terjadi di akhir dekade XX telah membawa kehancuran Uni Soviet yang telah dibangun selama lebih kurang tujuh dasawarsa. Uni Soviet resmi berakhir pada tanggal 25 Desember 1991 ketika Mikhail Gorbachev mengumumkan pengunduran dirinya menyusul kemelut politik sebagai kelanjutan kudeta yang gagal pada pertengahan bulan Agustus 1991. Namun, Rusia sudah diproklamkan pada tanggal 12 Juni 1990 dalam Sidang Pertama wakil rakyat Soviet Rusia (*RSFSR*). Pada tanggal yang sama tahun berikutnya juga terpilih Boris Yeltsin sebagai pemimpin Dewan Tertinggi RSFSR. Walaupun hal itu

terjadi pada saat Uni Soviet masih berdiri, namun tanggal tersebut hingga kini tetap diperingat sebagai hari kemerdekaan Rusia. Sementara itu, Uni Soviet pecah menjadi 15 negara baru. Ke-15 negara tersebut adalah Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Moldova, Ukraina, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Rusia. Meski terpecah, dipelopori Rusia, Belarus, dan Ukraina, mereka membentuk CIS (*Commonwealth of Independent State/Persemakmuran Negara Independen*).

Rusia di bawah kepemimpinan Yeltsin, secara umum menunjukkan ciri transnasional dari sistem Uni Soviet kepada sebuah Republik yang demokratis. Namun, kebangkrutan ekonomi yang diwarisi dari Uni Soviet masih menjadi masalah krusial yang tak terselesaikan. Proses perpindahan ekonomi sentralistik kepada sistem pasar belum menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini diperparah dengan tersendatnya proses integrasi wilayah-wilayah bekas Uni Soviet yang menolak bergaung dalam Federasi Rusia, seperti kasus Chechnya yang menolak bergabung sebagai subjek Federasi Rusia.

Proses swastanisasi yang dicanangkan pada masa pemerintahan Boris yeltsin merupakan konsekuensi logis dari upaya Rusia menuju sistem ekonomi pasar bebas. Bentuk kepemilikan negara dialihkan kepada kepemilikan swasta atau pribadi. Proses swastanisasi ini para gilirannya menguntungkan kelompok tertentu khususnya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Sumber-sumber yang penting bagi hajat orang banyak dikuasai kelompok yang sering disebut kelompok oligarki. Sektor-sektor tersebut meliputi: minyak, listrik, gas dan sumber sumber vital lainnya. Mereka membentuk lingkaran dalam yang

mendukung sekaligus memanfaatkan kekuasaan rezim Boris Yeltsin, di dalamnya termasuk keluarga presiden sendiri. Sepak terjang para oligarki itu pun menjadi sangat keterlaluan, di mana mereka tak segan-segan melakukan tindak kekerasan bagi siapa saja yang menghalangi bisnis mereka. Praktik mafia bermunculan akibat kelangkaan sistem hukum pada saat reformasi sedang terjadi, sehingga negara lemah dan tak mampu memberi perlindungan.²⁵

Menurut Joseph Stiglitz, seorang pengamat ekonomi dan pemenang nobel Ekonomi 2001, proses swastanisasi terhadap perusahaan negara di Rusia terkesan dipaksakan. Padahal, perubahan sistem ekonomi dari sistem terencana menuju mekanisme pasar membutuhkan waktu lama dan bertahap. Pola inilah yang dipilih China dan beberapa negara di Eropa timur, eks Blok Komunis. Sementara Rusia memilih jalur cepat. Namun yang terjadi adalah reformasi ekonomi yang tak kunjung membuahkan hasil. Bahkan hal yang lebih buruk terjadi, yakni hancurnya sendi-sendi kelembagaan. Ekonomi Rusia memasuki krisis, hingga kebangkrutan negara. Krisis ekonomi Rusia dikatakan lebih buruk dari *Great Depression* yang pernah menimpa AS periode 1929-1938. Kemerosotan ekonomi Rusia mencapai 40%. Kenaikan inflasi di Rusia pun terus terjadi, perusahaan milik negara berhenti memproduksi karena tuntutan swastanisasi. Reformasi ekonomi dilakukan serampangan sehingga jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan yang hanya 2% di masa Uni Soviet, anjlok menjadi 50% di masa Yeltsin.²⁶

Fenomena lain di masa pemerintahan Yeltsin yang dikenal dunia adalah permasalahan yang terjadi di salah satu bagian Rusia Selatan yaitu Chechnya.

²⁵ *Ibid*, hal 198-202

²⁶ Sigit, Samik, P. J. (ed.). *Rusia: Runtuhnya Ratu dan Era KGB*. Jakarta: Kompas, 2008, hal 1-3.

Pada tahun 1994, Perang Chechnya meletus ketika Moskow tidak berhasil menjinakkan keinginan Gronzy, ibukota Chechnya yang ingin memisahkan diri dari Federasi Rusia. Tak diindahkannya maklumat yang dikeluarkan Yeltsin oleh rakyat Chechnya membuat Moskow menyerang. Ribuan korban dari kedua belah pihak pun berjatuhan. Gerakan separatisme pimpinan Dzokhar Dudayev ini menjadi isu dunia di mana Rusia menilai wilayah Kaukasus Utara itu telah menjadi sarang terorisme. Rusia kembali menggempur dengan kekuatan militer sehingga menuai reaksi keras dari masyarakat internasional, terutama AS. Selain isu terorisme, posisi strategis Chechnya yang dilalui jalur pipa minyak terbesar di negara-negara CIS yang menuju Laut Hitam menjadikan Rusia sangat keras mempertahankan daerah tersebut. Lepasnya Chechnya akan mengganggu keutuhan integritas Rusia dan merusak tatanan geopolitik di wilayah Selatan Rusia. Selain itu, muncul juga isu agama dalam konflik tersebut di mana mayoritas penduduk Chechnya beragama Muslim.²⁷

Di tahun 1999, Yeltsin secara mendadak mengundurkan diri dan mengumumkan Perdana Menteri Rusia saat itu, Vladimir Putin, ditunjuk menjalankan posisi presiden. Tahun 2000, diadakan pemilihan presiden yang mengangkat secara tetap Vladimir Putin sebagai presiden periode 2000-2004. Putin mengalahkan nama-nama lama yang sudah terkenal di politik Rusia seperti Gennady Zyuganov (Ketua Partai Komunis), Gregory Yavlinsky (Ketua Partai

Yabloko), dan Aman Tuluyev (gubernur Propinsi Kemerovo) dengan perolehan 39,7 juta suara atau 52,94 % suara pemilih.²⁸

Vladimir Putin lahir di Leningrad atau yang dikenal dengan St. Petersburg, 7 Oktober 1952. Setelah lulus dari Universitas Leningrad tahun 1975 ia langsung direkrut KGB, dinas rahasia Uni Soviet. Selama di KGB, ia sering menggunakan nama samara “grey cardinal”. Setelah beberapa tahun ditempatkan di dalam negeri, pada tahun 1985 Putin ditempatkan di Dresden, dulu berada di wilayah Jerman Timur selama 5 tahun. Pada era inilah Putin menyaksikan sendiri puncak pertarungan kekuatan Jerman Barat yang Berjaya secara melawan komunis Jerman Timur yang di ambang kehancuran.

Putin bekerja untuk KGB selama 15 tahun sebelum akhirnya terjun ke dunia politik. Ia menjadi Wakil Walikota St. Petersburg di tahun 1994. Sejak itu, karir Putin terus menanjak. Sebelum diangkat Boris Yeltsin menjadi Perdana Menteri pada Agustus 1999, ia telah lebih dulu menduduki sejumlah jabatan penting di Kremlin, seperti Kepala Departemen Kontrol, Kepala Dinas Keamanan Federal (FSB), dan sekretaris Dewan Keamanan. Mundurnya Yeltsin, Desember 1999, dan lalu mengangkat Putin sebagai Presiden sementara benar-benar membuka jalan baginya untuk memimpin Rusia.

Sejak terpilih menjadi presiden pada pemilihan umum tahun 2000, Putin benar-benar menjadi penguasa Kremlin abad 21. Putin kembali menang di pemilu 2004. Sistem di Rusia yang membatasi seseorang untuk hanya bisa menjabat

²⁸ Russia, Electoral Geography 2000, <http://www.electoralgeography.com/en/countries/russia/2000-president-elections-russia.html>

sebagai presiden dalam dua periode berturut-turut.²⁹ Sistem ini membuatnya mendukung penuh Dimitry Medvedev sebagai presiden pada pemilihan presiden tahun 2008 yang lalu menunjuknya sebagai Perdana Menteri. Empat tahun berselang, Putin kembali mencalonkan diri dan menang lalu berbalik menunjuk Medvedev sebagai Perdana Menteri.

B. Federasi Rusia Pasca Naiknya Vladimir Putin

Vladimir Putin, disebut banyak kalangan sebagai seseorang yang membangkitkan kembali Rusia dari ketepurukan di berbagai bidang. Saat Putin mulai memimpin Rusia, negara sedang berada dalam kondisi ekonomi yang sangat buruk akibat akumulasi kegagalan ekonomi dan bidang lain baik di era Rusia di bawah Gorbachev, di mana Rusia sebagai pewaris keterpurukan tersebut. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan ekonomi di era Yeltsin yang tidak berhasil mengangkat perekonomian negara bahkan cenderung lebih buruk. Menurut evaluasi yang dilakukan pemerintahan Putin langsung di awal pemerintahan, memperlihatkan bahwa perekonomian Rusia memasuki masa terburuk terutama pada Agustus 1997. Kurs Rubel terus terancam devaluasi. Hal ini yang membuat Rusia di bawah Putin, menitikberatkan Rusia untuk menstabilkan kondisi ekonomi negara. Dan bagi kebanyakan orang, Putin berhasil melakukannya. Meski berhasil mengangkat perekonomian negara, di bawah

seiring semakin hilangnya prinsip-prinsip demokrasi yang digalakkan dari awal Federasi Rusia berdiri.

1. Putin Sebagai Presiden Rusia (2000-2008)

Setelah Putin terpilih menjadi presiden pada tahun 2000, kebijakan pemerintah Rusia menjadi sangat ambisius dan tegas dalam menumbuhkan kekuatan ekonomi dan berkonsentrasi pada kekuatan politik. Ambisi Putin terlihat dari kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambil, namun berawal dari pembenahan di dalam negeri untuk memulai kejayaan kembali negara ini. Salah satu kebijakan dalam negeri yang diambil Putin yang sering dibicarakan banyak orang mengawali kembalinya kejayaan Rusia adalah dengan memberangus Oligarki yang menguasai Rusia selama pemerintahan Yeltsin. Sebenarnya, naiknya Putin sebagai presiden tak lepas dari peran para Oligarki. Namun tak lama setelah dilantik. Putin langsung mencanangkan jarak pada semua oligarki. Putin melakukannya dengan pembenahan di banyak bidang meski dengan cara yang tidak demokratis. Semua lembaga pemerintahan dibuat hanya berpihak pada para eksekutif di Kremlin, sebutan pemerintahan Rusia. Putin menempatkan para eks anggota KGB di berbagai departemen dan posisi penting lainnya. Di sebuah tulisan di *Washington Quarterly*, Putin mengatakan seacara tegas bahwa sebagai sektor bisnis yang strategis, perusahaan domestik harus dilindungi dari kekuatan globalisasi dan oligarki harus dihapus sebagai sebuah kelas. Negara harus mengontrol kekayaan. Rakyat pun mendukung Putin, dalam sebuah jajak pendapat di awal periode 2000, sekitar 77% warga Rusia meminta privatisasi dibatalkan

atau setidaknya direvisi. Putin lalu menangkap dan memenjarakan Mikhail Khodorkovsky, salah satu oligarki Rusia ternama. Tindakan keras yang diambil Putin terhadap Khodorkovsky membuat Oligarki lain di Rusia makin tiarap dan bertekuk lutut. Upaya Putin ini juga berujung positif saat rasa nasionalisme warga Rusia makin kuat akibat sentimen mereka terhadap pencaplokan kekayaan alam oleh oligarki selama ini.

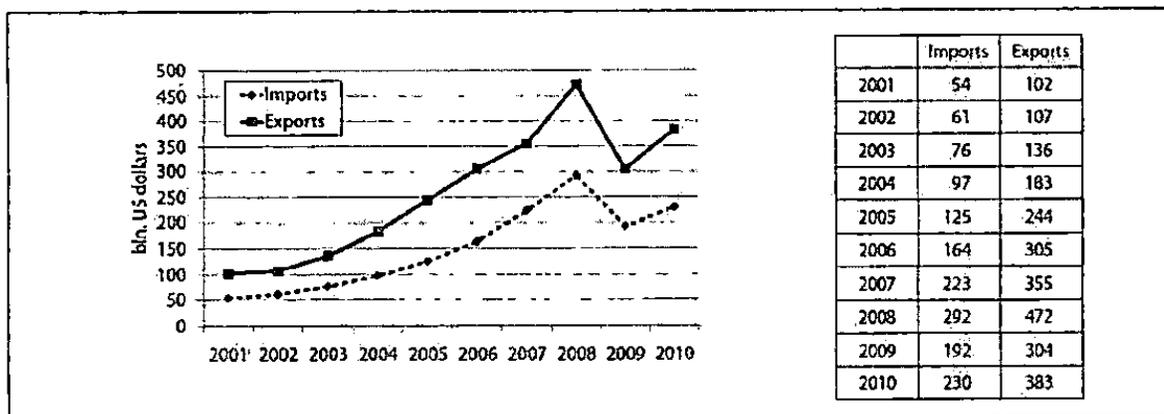
Pemberangusan Oligarki menjadi awal kebangkitan ekonomi Rusia di bawah Putin. Meskipun di mata Barat, Putin dianggap sebagai diktator baru dan Rusia disebutkan mengarah pada demokrasi yang tidak menentu, tapi Rusia menjadi menjadi model yang membuktikan bahwa kebangkitan negara dari kehancuran ekonomi bisa diraih tanpa resep IMF seperti era Yeltsin. Hal ini bukan tanpa indikator yang jelas. Salah satu indikator utama perbaikan status sosial ekonomi Rusia yang paling menonjol adalah berkurangnya jumlah warga yang miskin. Pada 8 Februari 2005 misalnya, Bank Dunia mengeluarkan laporan yang isinya mengutarakan sukses Rusia mengurangi kemiskinan dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi domestik dan juga meningkatkan pengeluaran sosial. Program pengurangan kemiskinan menjadi bagian dari proyek-proyek Rusia yang berskala nasional. Proyek-proyek ini diimplemetasikan secara jangka panjang ke empat jenis proyek yakni kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pertanian. Hal-hal tersebut tercermin misalnya dalam peningkatan pengeluaran sektor kesehatan dengan pembangunan rumah sakit baru, peningkatan gaji dokter dan undang-undang yang menjamin bebasnya biaya kesehatan bagi semua warga Rusia.

Putin juga memperkuat pengeluaran untuk sistem perlindungan sosial. Terjadi peningkatan dana pensiunan yang menjadi komponen utama strategi peningkatan kemiskinan. Pemerintah lalu melakukan pengadaan asuransi sosial, bantuan untuk pengangguran dan kelompok warga termiskin. Program perlindungan sosial yang sudah umum dijalankan di Eropa Barat inilah yang berperan menurunkan jumlah warga miskin. Hasilnya, Rusia berhasil menaikkan jumlah warga kelas menengah dari 8 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi 55 juta jiwa pada tahun 2005 menurut surat kabar mingguan *AS Business Week*. Pengangguran juga menurun dari 8,6 juta jiwa di tahun 2000 menjadi 5 juta pada 2006.³⁰

Semua program perlindungan sosial Rusia ini lalu membuat peningkatan kontribusi di sektor minyak, gas alam, logam, dan kayu lapis pada penerimaan negara. Sektor-sektor ini menyumbang lebih dari 80% terhadap total ekspor Rusia dan hampir semuanya mengalir ke kas negara. Sektor minyak dan gas adalah penyumbang terbesar pertumbuhan produksi domestik bruto (PDB) Rusia dengan memberi 5,7% dari rata-rata 6-7% pertumbuhan PDB per tahun. Saat di era Yeltsin harga minyak dunia tidak pernah mencapai 30 dollar AS per barel, di tahun 2007 bahkan minyak dunia mencapai 89 dollar AS per barel. Di saat yang bersamaan, kebijakan negara untuk mengontrol sektor energi membuat negara dan rakyat Rusia benar-benar menikmati kenaikan harga minyak dunia ini. Lebih dari 30 persen impor minyak Eropa berasal dari Russia, dengan tujuh negara di antaranya

menerima 40 persen gas dari Russia, Yunani menerima 84 persen, Austria 78 persen, sementara negara-negara Baltik dan Finlandia mencapai 100 persen pada tahun 2006.³¹ Kenaikan penerimaan dari migas membuat Rusia juga mencatatkan peningkatan cadangan devisa dari 12 miliar dollar AS pada tahun 1000 menjadi 315 miliar dollar AS pada 2006. Angka ini adalah angka ketiga terbesar di dunia saat itu setelah China dan Jepang. Bahkan Oktober 2007 cadangan devisa Rusia mencapai 447,9 miliar dollar AS. Demikian juga jumlah ekspor Rusia ke luar negeri dari tahun ke tahun.

Tabel 2.1 Ekspor dan Impor Rusia 2001-2010 (dalam Milyar US Dollar)



Sumber: *Russian Analytical Digest Vol 88*, Center for Security Studies ETH Zurich, <http://www.css.ethz.ch>

Diberangusnya oligarki ternyata tidak membuat investasi asing di Rusia hilang. Bahkan investasi asing juga menjadi pelengkap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Rusia. Dari Januari-Juni 2007, investasi asing yang masuk

³¹ Oldberg, Ingmar. 2010. *Russia's Great Power Strategy under Putin and Medvedev*. Swedish Institute of International Affairs Occasional III Paper No. 1 (<http://www.ssi.se/> diakses 10

ke Rusia mencapai 60,3 miliar dollar AS. Mulai dari perusahaan bir, otomotif, bahkan perbankan asing. Bayangkan saja, rata-rata gaji warga Rusia naik dari 65 dollar AS pada tahun 1999 menjadi 540 dollar AS pada Agustus 2007. Selain itu, Rusia juga menjadi sumber utama pasokan senjata ke China dan India, serta juga memasok senjata ke Iran, Aljazair, Venezuela, dan negara lain. Secara keseluruhan sebanyak 30% penjualan senjata di dunia berasal dari Rusia.

Keberhasilan di bidang ekonomi ini lalu membuat Rusia tak sekadar bangkit. Di bawah Putin, negara ini mempertegas posisinya dalam kekuatan dunia internasional. Putin memperlihatkan bahwa Rusia telah kembali menjadi negara yang berpengaruh di dunia, bahkan berani menantang AS. Putin sangat mendukung kebijakan perang melawan terror yang digagas AS, namun Rusia tidak pernah setuju akan invasi AS ke Irak pada tahun 2003 lalu. Rusia juga menolak pemberlakuan sanksi terhadap Iran yang dilakukan AS dan Uni Eropa dan menentang rencana AS menyerang Iran secara militer tahun 2007. Rusia bahkan di bawah Putin menjalin kemitraan dengan sejumlah negara yang memusuhi AS, seperti Kuba dan Venezuela.³²

Putin juga mengatakan ingin menciptakan tatanan dunia baru yang lebih kuat dan berimbang. Hal ini dilakukan Putin dengan mulai merangkul banyak negara demi terciptanya dunia yang aman dan stabil. Ia bahkan membina hubungan dengan Uni Eropa, mendekatkan diri ke Asia khususnya India dan China, serta menjadi anggota resmi G-8. Rusia yakin setelah misi domestik tercapai, Rusia akan memiliki kekuatan untuk menjadi negara yang berperan

³² Masa Pertama Putin sebagai Presiden Rusia

<http://jakarta.okezone.com/read/2012/05/07/414/625225/masa-pertama-putin-sebagai-presiden->

penting secara positif bagi negara-negara lain, meskipun jelas juga demi memperkuat diri.

Kebijakan Luar Negeri di era Putin memang lebih tampak dibanding era sebelumnya. Putin menginginkan Departemen Luar Negeri Rusia yang kuat sehingga dapat mengemban tanggung jawab internasional demi kepentingan negara. Prioritas pertama Rusia ditujukan pada negara-negara dekat, atau yang sering disebut kebijakan *near abroad*. Prioritas ini ditujukan untuk menjamin keamanan Rusia secara geopolitis pasca runtuhnya Soviet. Melalui payung CIS, Rusia gencar menjalankan kerjasama dengan negara-negara bekas Uni Soviet, termasuk penyelesaian bersama atas konflik yang terjadi di negara-negara CIS.

Selain negara-negara *near abroad*, Rusia di era Putin juga memperkuat kerjasama dengan negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia, yang secara geopolitis juga berdekatan dengan negara ini. Di Eropa misalnya, Rusia berkepentingan langsung dengan perkembangan Organisasi Kerjasama dan Keamanan Eropa (*OSCE*). Dengan Cina, Rusia berusaha menjalin hubungan simbiosis mutualisme di berbagai bidang khususnya politik dan ekonomi. Hubungan-hubungan baik juga diciptakan Putin dengan beberapa negara Timur Tengah seperti Iran, Suriah dan Libya. Rusia juga menjalin hubungan dengan India demi menciptakan stabilitas di Asia Selatan mengingat India merupakan salah satu negara pemilik nuklir pada saat itu sehingga Rusia melihat pentingnya Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir demi terpeliharanya perdamaian di kawasan tersebut.

2. Putin sebagai Perdana Menteri Rusia (2008-2012)

Konstitusi di Rusia membatasi seseorang hanya bisa memegang jabatan sebagai orang nomor satu di negara itu sebanyak dua kali berturut-turut, artinya Putin yang telah dipilih melalui pemilihan umum sebagai presiden selama dua periode dilarang mencalonkan dirinya kembali. Adalah Dimitry Medvedev, eks deputy perdana menteri periode sebelumnya, yang lalu menjadi sekutu Putin dan didukungnya untuk menjadi calon presiden 2008-2012. Dukungan penuh Putin kepada Medvedev berbalik janji Medvedev untuk mengangkat Putin menjadi Perdana Menteri jika terpilih menjadi presiden. Hal inilah yang memberi pengaruh besar keberhasilan Medvedev memenangkan pemilihan presiden. Hampir $\frac{3}{4}$ pemilih Medvedev diyakini sebenarnya merupakan pendukung Putin. Menurut sebuah survey, jika Putin dan Medvedev, keduanya mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun itu, Medvedev hanya akan menerima 9 persen pemilih. Orang menyebut bahwa kekuatan terbesar yang dimiliki Medvedev adalah Putin. Dipilihnya Putin sebagai perdana menteri pada periode ini selanjutnya menjaga dominasi politik Putin di Rusia yang bahkan lebih besar dari Sang Presiden sendiri.³³

Pada awal pemerintahannya, Medvedev membuat perubahan dalam sistem pemerintahan berupa amandemen pada konstitusi Rusia. Amandemen ini menjadi perubahan substansial pertama pada konstitusi Rusia sejak berdirinya negara ini. Perubahan mendasar tersebut berupa perpanjangan masa jabatan presiden dan Duma dari empat tahun menjadi enam tahun. Dalam sebuah pidato kenegaraan

³³ Medvedev, Former President Who Was Never Really President
<http://tulldispatch.com/politics/12260.html> diakses pada 10 September 2012

pada 5 November 2008, Medvedev menjelaskan alasan amandemen ini. Ia mengatakan bahwa kebebasan dan demokrasi akan sukses hanya jika Presiden dan Duma bisa menjaga otoritas pada level yang tinggi tidak hanya dalam janji-janji di saat kampanye, melainkan juga dengan hasil dari pekerjaannya, dan jika mereka memiliki waktu yang cukup, maka mereka dapat membuktikan janji-janji dengan memperlihatkan hasilnya kepada masyarakat. Dengan diperpanjangnya periode jabatan ini lalu juga akan mempertahankan stabilitas politik sehingga fokus kepada banyak permasalahan negara bisa lebih diperhatikan.³⁴ Tapi para jurnalis di Rusia justru berspekulasi bahwa diperpanjangnya periode pemerintahan adalah upaya awal dari rencana kembalinya Putin yang akan mencalonkan diri sebagai presiden untuk periode selanjutnya, sehingga memiliki waktu yang lebih lama untuk berkuasa, dan terbukti.

Pada tahun 2008 itu juga, Rusia, seperti negara lainnya, ikut terbawa arus krisis ekonomi domestik AS yang menjelma menjadi krisis ekonomi global. Bencana finansial yang melanda AS itu membuat harga minyak turun sangat tajam. Harga yang semula bisa mencapai 150 dollar AS turun drastis ke angka 40 dollar per barel. Padahal, ekonomi Rusia sangat bergantung pada produksi dan ekspor minyak ke luar negeri. Situasi krisis juga mengakibatkan turunnya jumlah permintaan, mata uang Rusia, Rubel pun ikut melemah. Banyak perusahaan besar yang mengurangi investasinya. Krisis menyentuk hampir semua bentuk bisnis dan

³⁴ Dimitriy Medvedev, Pidato Presiden di Grand Kremlin, Moskow, 5 November 2008, teks: http://archive.kremlin.ru/eng/speeches/2008/11/05/2144_tvne70029tvne82917tvne127286_208836

pekerja. Perusahaan-perusahaan mengurangi jam kerja, gaji, bahkan mengurangi jumlah karyawan.³⁵

Kondisi ini lalu direspon pemerintah Rusia dengan menggunakan lebih dari satu triliun rubel, atau 40 miliar dollar AS untuk menyelamatkan bank-bank negara, membentuk sebuah program stimulus dengan skala besar, meminjamkan lebih dari 50 miliar dollar AS agar sejumlah perusahaan bertahan. Hasilnya, tak ada satupun bank utama yang kolaps, sejumlah permasalahan perusahaan-perusahaan besar dapat diatasi dengan cara yang efektif. Situasi ekonomi Russia kembali stabil pada tahun 2009, namun pertumbuhan ekonomi baru benar-benar terjadi lagi pada tahun 2010.

Peristiwa besar yang terjadi pada periode ini adalah konflik berkepanjangan yang muncul kembali pada tahun 2008 antara Georgia dengan dua daerah separatisnya, Ossetia Selatan dan Abkhazia. Konflik ini dikenal dengan Perang Ossetia Selatan atau ada yang menyebutnya Perang Russo-Georgian lantaran perang tersebut melebar melibatkan Rusia yang mendukung separatisme Ossetia Selatan dan Abkhazia. Keterlibatan Rusia berawal dari serangan Georgia diluncurkan pada malam 7-8 Agustus ke Ossetia Selatan dengan lebih dari 10 ribu pasukan dan 75 tank. Sejumlah pasukan perdamaian Rusia terbunuh dalam serangan itu, termasuk banyak penduduk Ossetia Selatan yang berkewarganegaraan Rusia. Sejumlah pihak mengatakan bahwa invasi Rusia ke wilayah Georgia adalah harga yang harus dibayar Georgia karena kebijakannya yang pro barat. Rusia memang telah lama melakukan intervensi pada konflik ini

³⁵ Global financial crisis in Russia 2008-2009. Causes and consequences <http://www.mirovoy-crisis.ru/crisis-in-russia-ru-dikces-22-September-2012>

dengan memberikan kewarganegaraan bagi warga Ossetia Selatan yang meninginginkannya. Warga negara itulah yang menurut Rusia harus mereka lindungi keberadaannya. Rusia pada akhirnya mengakui kemerdekaan Ossetia Selatan dan Abkhazia, sementara PBB tidak. Georgia pun lalu menyatakan keluar dari CIS setelah peristiwa tersebut.

Sejak Putin naik tahta menjadi presiden, Rusia memang terlihat menjadi negara yang sangat ambisius. Rusia berupaya memperbesar kekuatan di segala bidang, di mana kekuatan yang dimiliki itu digunakan untuk mempengaruhi negara lain. Rusia dengan kekuatannya berani menekan negara lain demi kepentingan Rusia di negara tersebut maupun agar negara tersebut mendukung kebijakan Rusia terhadap negara lainnya. Sifat ambisius Putin tak hilang saat Rusia dipimpin Medvedev. Salah satunya, Rusia menggunakan kedekatan mereka dengan Nikaragua dan Venezuela di bidang persenjataan untuk mempengaruhi kedua kengara tersebut untuk ikut mengakui Ossetia Selatan dan Abkhazia sebagai negara terpisah dari Georgia.

Rusia juga memiliki hubungan pasang surut dengan NATO. Pada tahun 2010, Medvedev menyetujui doktrin militer yang menentukan keputusan negara dalam bidang militer. Dalam doktrin ini, melanjutkan strategi keamanan nasional 2009, Rusia menyebut NATO sebagai bahaya karena ekspansi terhadap negara yang berbatasan dengan Rusia, seperti Ukraina dan Georgia. Rusia lalu memperkuat aliansi militernya dengan beberapa negara bekas Soviet dalam CSTO untuk megimbangi NATO. Aliansi ini menyepakati bahwa serangan terhadap salah satu anggota CSTO merupakan serangan terhadap seluruh negara anggota.

termasuk juga peningkatan anggaran militer. Meskipun pengaruh Putin di pemerintahan Medvedev dikatakan sangat besar, tidak semua kebijakan Medvedev sejalan dengan yang dilakukan Rusia pada dua periode sebelumnya. Misalnya terhadap hubungan negara tersebut dengan Iran. Selama ini Iran menjadi salah satu negara yang dekat dengan Rusia dan memiliki andil membangkitkan kembali ekonomi Rusia. Namun, di saat Iran dikecam Uni Eropa dan AS karena pengembangan nuklir, Rusia justru ikut mendukung pemberian sanksi terhadap pengembangan nuklir tersebut oleh PBB, sehingga hubungan Rusia dan Iran sempat merenggang. Sementara itu, pada akhir 2011, setelah negosiasi panjang yang memakan waktu lebih dari 15 tahun, Russia akhirnya bergabung dengan

WTO. *Kontribusi Indonesia dalam Disintegrasi tahun 2012*